

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK
DALAM PERJANJIAN NOMINEE**



Disusun Oleh:

**PRO PATRIA
YUNI ANITA MARIANA**

NIM: 12217010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

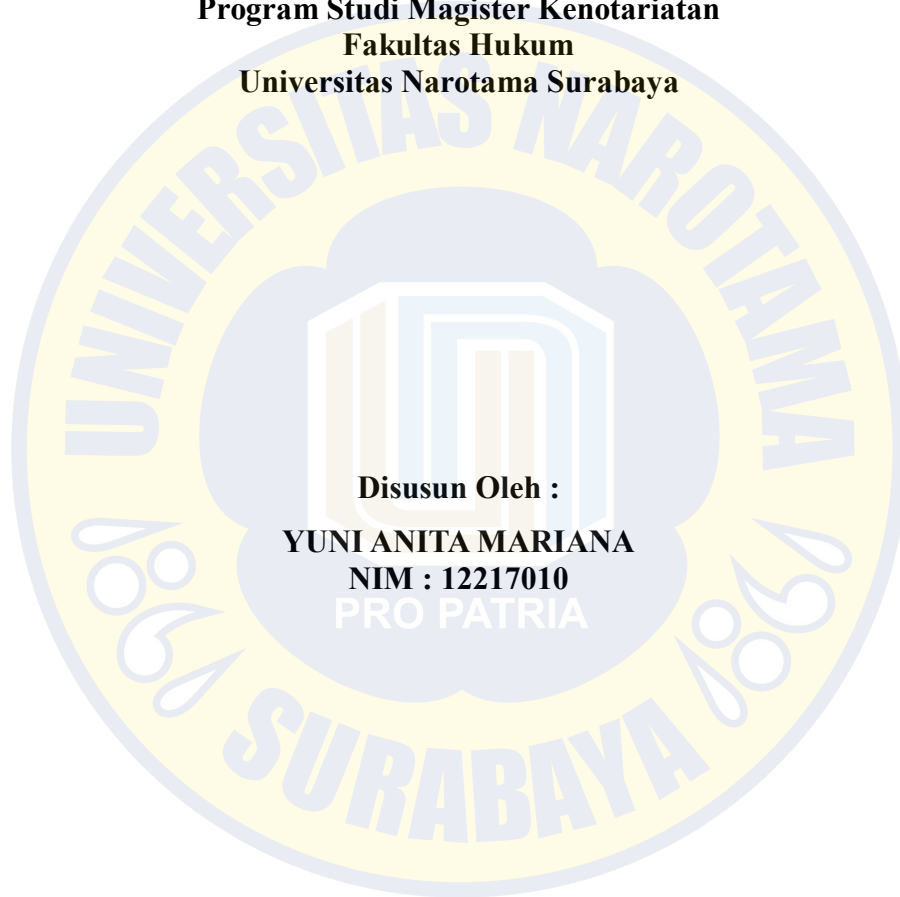
UNIVERSITAS NARDOTAMA SURABAYA

2019

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK
DALAM PERJANJIAN NOMINEE**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



Disusun Oleh :

**YUNI ANITA MARIANA
NIM : 12217010
PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2019

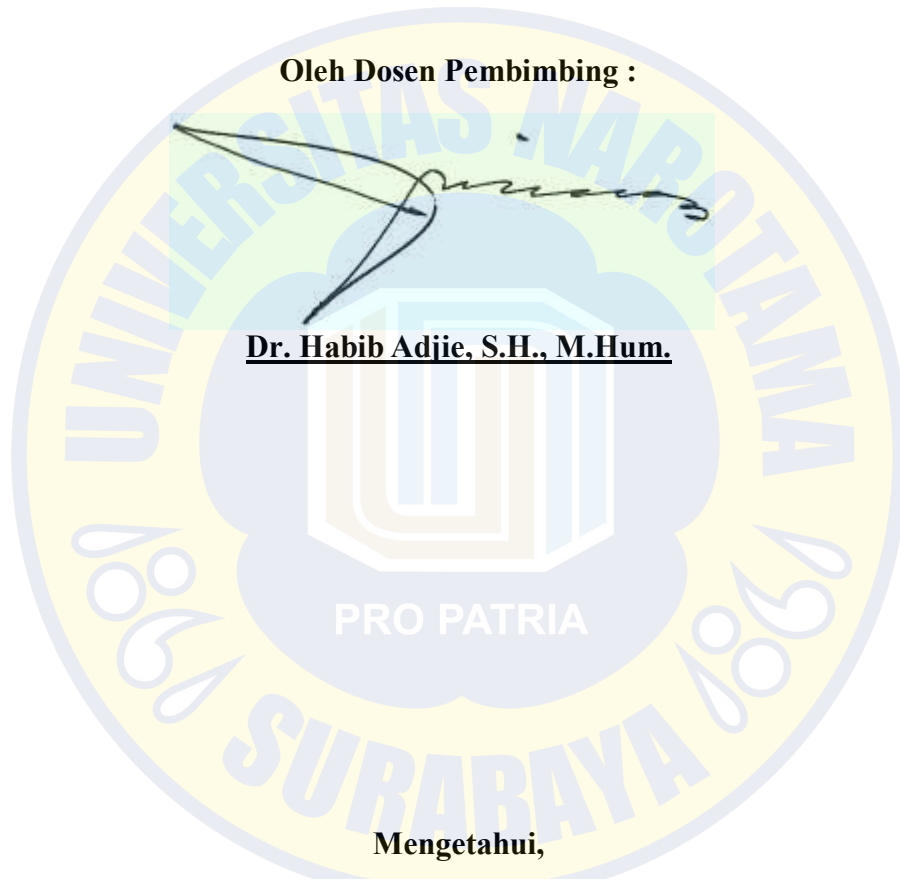
Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SEMINARKAN
PADA TANGGAL**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



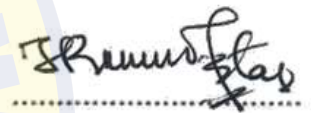
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



.....

Anggota : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

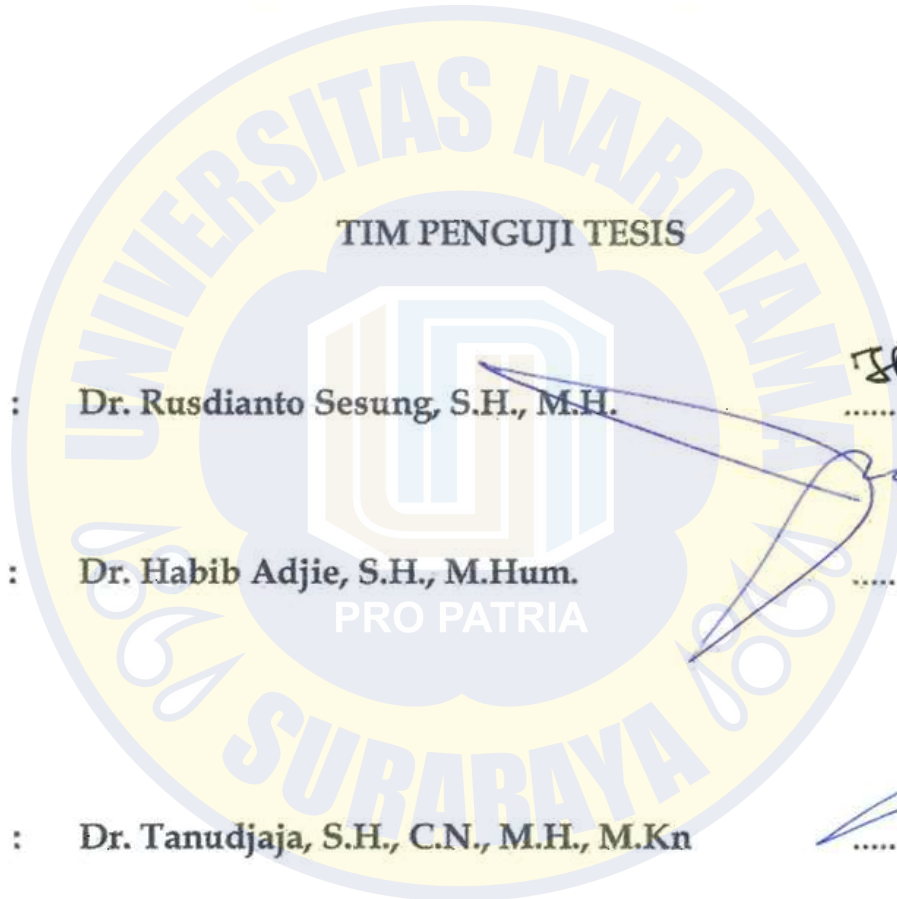


.....

: Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn



.....



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



YUNI ANITA MARIANA

NIM : 12217010

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK DALAM PERJANJIAN NOMINEE

Tesis ini menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris atas penyelundupan pajak dalam perjanjian nominee.

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai permasalahan hukum dalam masyarakat. Dalam praktik Notaris banyak ditemukan bahwa Notaris membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak yang dilakukan oleh investor asing dengan orang lokal di Indonesia.

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Tanggung Jawab Notaris Atas Permintaan Para Penghadap Untuk Membuat Perjanjian Nominee. Pada dasarnya, hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap ataupun para pihak yang membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat dibuatnya perjanjian itu belum terjadi permasalahan apapun. Pada dasarnya dalam pembuatan akta, Notaris hanyalah mengkonstatir kehendak para pihak, berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.

Bab III merupakan hasil penelitian dari rumusan yang kedua Akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak. Perjanjian *nominee* itu sendiri dibuat oleh Notaris. Jika mengandung upaya penyelundupan pajak dalam pembuatan nominee tersebut, maka Notaris dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan bila nantinya dikemudian hari timbul permasalahan-permasalahan dari adanya perjanjian tersebut. Bisa jadi terdapat pihak-pihak yang dikemudian hari merasa dirugikan, termasuk Pemerintah sendiri yang dirugikan, karena nantinya menyangkut pendapatan Negara karena terkait dengan penyelundupan pajak. Oleh karena itu, akan ada akibat hukum bagi Notaris apabila membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa berkaitan dengan kewajiban jabatan yang diembannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris diwajibkan bertanggung jawab menolak membuat suatu perjanjian *nominee* karena perjanjian tersebut dinilai mengandung unsur itikad tidak baik dan melawan hukum. Akibat hukum bagi Notaris itu sendiri yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan, administratif, serta pidana. Notaris harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani para penghadap yang hendak dimintakan membuat akta. Untuk Pemerintah yang berwenang membuat Undang-Undang diharapkan mengkonstruksikan Hukum yang baru terhadap pelanggaran *Nominee* lebih tegas dan terang.

ABSTRACT

Responsibility of the Notary for Tax Smuggling in the Nominee Agreement

The principle of freedom of contract which is part of an agreement is often misused to carry out legal smuggling. One form of agreement that is often related to legal smuggling is the nominee agreement. Many nominee agreements were made to avoid tax obligations which ultimately resulted in a tax smuggling crime. Generally the nominee agreement is made with a Notary deed so that in this case the birth is also the responsibility of the Notary who made the deed.

This study further examines the responsibilities of Notaries at the request of the viewers to make nominee agreements and legal consequences for Notaries who make nominee agreements containing tax smuggling.

The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal material while the problem approach is done using a legal approach and conceptual approach.

The results of the study indicate that the nominee agreement is included in the nameless agreement. In the contract law both the named agreement and the nameless agreement must pay attention to the legal terms of an agreement. A nominee agreement made with the purpose of tax smuggling specifically to avoid tax obligations violates the legal conditions of the agreement, namely a lawful cause so that it relates to the duties and authorities of the Notary required to refuse to make a nominee agreement because the agreement is considered to contain bad faith and fight law .. The legal consequences for Notaries who make nominee agreements containing smuggling of tax can be subject to civil, criminal and administrative sanctions.

Keywords: Notary Deed, Nominee Agreement, Tax Smuggling

ABSTRAK

Tanggung Jawab Notaris Atas Penyelundupan Pajak Dalam Perjanjian Nominee

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi bagian dari suatu perjanjian seringkali disalahgunakan untuk melakukan suatu penyelundupan hukum. Salah satu bentuk perjanjian yang seringkali berkaitan dengan penyelundupan hukum adalah perjanjian nominee. Perjanjian nominee banyak dibuat untuk menghindari kewajiban perpajakan yang pada akhirnya membuat terjadi tindak pidana penyelundupan pajak. Umumnya perjanjian nominee dibuat dengan akta Notaris sehingga dalam hal ini melahirkan pula tanggung jawab bagi Notaris yang membuat akta tersebut.

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab Notaris atas permintaan para penghadap untuk membuat perjanjian nominee dan akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee termasuk kedalam perjanjian tidak bernama. Dalam hukum perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama wajib memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian nominee yang dibuat dengan tujuan penyelundupan pajak khususnya untuk menghindari kewajiban perpajakan melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sehingga berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris diwajibkan bertanggung jawab untuk menolak membuat suatu perjanjian *nominee* karena perjanjian tersebut dinilai mengandung unsur itikad tidak baik dan melawan hukum.. Akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana serta administratif.

Kata Kunci : Akta Notaris, Perjanjian Nominee, Penyelundupan Pajak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu,,alaihi wasallam dan keluarganya, para Sahabat, para Tabi"in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan Tesis dengan judul: "Tanggung Jawab Notaris Atas Penyelundupan Pajak Dalam Perjanjian Nominee". yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Strata Dua dalam Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

Selanjutnya, penyusun sadari tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya Tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, SE, MM selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk dan saran-saran yang bermanfaat serta sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ibu Koestiati, S.sos selaku Kepala Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya. yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Karyawan Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Ayahanda H.Maryono, Ibunda Hj. Suharsih, Suami Ucok Budiharto, dan seluruh keluarga tercinta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan ke XIV, terima kasih untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan Tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga Tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Surabaya,

Yuni Anita Mariana, S. H



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Originalitas Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	15
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1. Tipe Penelitian.....	20
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	22
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TANGGUNG JAWAB SEORANG NOTARIS ATAS PERMINTAAN PARA PENGHADAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN NOMINEE

2.1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian.....	24
2.2 Pengertian Perjanjian.....	29
2.2.1. Asas-Asas Perjanjian.....	31
2.2.2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	32
2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
2.3. Nominee Menurut Hukum Perdata dan Praktiknya dalam Dunia Perpajakan di Indonesia.....	40
2.3.1. Pengertian Nominee Secara Umum (Kaitannya dengan Hukum Perdata).....	40
2.3.2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Nominee.....	43
2.3.3 Praktik Nominee dalam Penanaman Modal dikaitkan dengan Perpajakan di Indonesia.....	45
2.4. Tanggung Jawab Notaris Atas Permintaan Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian Nominee.....	48

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUAT PERJANJIAN NOMINEE YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN PAJAK

3.1. Implikasi Hukum Dari Perjanjian Nominee.....	52
3.2 Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Pajak.....	55

3.3 Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Membuat Perjanjian Nominee
Yang Mengandung Penyelundupan Pajak.....57

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....65
4.2 Saran.....66

